

---

## DIMENSI SOSIAL EKONOMI BANTUAN SISWA MISKIN DI TTS NTT

### *Abstract*

*The BSM cash transfer scheme aimed to reach one-third of Indonesian households to provide some compensation for the reduction in the fuel subsidy at a time of rapid fuel and food – particularly rice – price inflation. Cash was disbursed in several rounds in 2007-2014. BSM attracted considerable negative public attention due to widespread protests, chiefly as a result of perceived inaccuracies in relation to beneficiary selection; some protests were violent, and the programme as a whole suffered from adverse public attention. But BSM is specifically for helping student from elementary school to senior high school*

*Keywords: Student, Programme, Poor*

---

**Francisia W. Bello**

E-mail: fwelhelmina@gmail.com

---

Dosen FISIP Undana  
Nusa Tenggara Timur

### **A. Karakteristik Lokasi Penelitian**

#### **1. Karakteristik Kabupaten**

Secara geografis, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) beriklim tropis. Cuaca di Kabupaten ini umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun, berganti dari musim kemarau dan musim penghujan. Letaknya yang lebih dekat dengan Australia dibanding Asia, menyebabkan curah hujan di Kabupaten TTS ini relatif rendah.

Kabupaten TTS memiliki luas sekitar 3.995.88 Km persegi. Di sebelah utara, Kabupaten TTS berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara. Di sebelah timur, Kabupaten TTS berbatasan dengan kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu. Di sebelah barat, Kabupaten TTS berbatasan dengan Kabupaten Kupang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor. Berikut adalah peta Kabupaten TTS:



Dari aspek pemerintahan, Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari 32 kecamatan, 228 desa dan 12 kelurahan, yang merupakan hasil pemekaran dari 21 Kecamatan induk hingga tahun 2009. Terdapat 8 (delapan) kecamatan yang memiliki wilayah cukup luas dan akhirnya dimekarkan berdasarkan SK Gubernur Nomor Pem.66/1/32, antara lain: *Pertama*, Kecamatan Mollo Utara dengan wilayahnya meliputi: bekas wilayah kefetoran Gunung Mutis dan sebagian wilayah Kefetoran Nunbena, Paeneno dan Netpala. *Kedua*, Kecamatan Mollo Selatan dengan wilayahnya meliputi: bekas wilayah kefetoran, Bijeli, Besana dan sebagian wilayah bekas Kefetoran Nunbena, Paeneno dan Netpala. *Ketiga*, Kecamatan Amanuban Timur dengan wilayahnya meliputi: bekas wilayah kefetoran Noebunu dan Noehambet. *Keempat*, Kecamatan Amanuban Tengah dengan wilayahnya meliputi: bekas wilayah kefetoran Noeliu dan Noesiu. *Kelima*, Kecamatan Amanuban Selatan dengan wilayahnya meliputi: bekas wilayah kefetoran Noemuke dan Noebaba. *Keenam*, Kecamatan Amanuban Barat dengan wilayahnya meliputi: bekas wilayah kefetoran

Noemeto. *Ketujuh*, Kecamatan Amanuban Selatan dengan wilayahnya meliputi: bekas wilayah kefetoran Noebone dan Noebana. *Kedelapan*, Kecamatan Amanuban Utara dengan wilayahnya meliputi: bekas wilayah kefetoran Noe Manumuti dan Noe Bakang.

Dari aspek pendidikan, masyarakat di Kabupaten TTS umumnya memiliki jenjang pendidikan sekolah dasar (SD dan SMP) hingga SMA/SMK. Meski demikian ada juga di antara anak usia dari 10 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sekolah dasar. Berikut ini adalah tabel presentase penduduk berumur 10 tahun keatas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki dan jenis kelamin.

**Tabel 1**  
**Presentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin**

	Jenis Keamin		Jumlah
	Lk	Pr	
Belum, tidak pernah sekoah	43,23	44,92	44,10
Sekolah Dasar	26,92	32,50	29,80
SMP Umum	14,24	11,14	12,64
SMA Umum	11,70	8,64	10,12
SMK Kejuruan	1,24	1,20	1,22
Diploma.I/II Diploma.I/II	0,83	0,32	0,56
Diploma.III/ Diploma III	0,90	0,53	0,71
Diploma.IV/Un iversitas	0,94	0,75	0,85

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS 2009.

Sementara kondisi anak usia dari 10 tahun ke atas dari status pendidikan dan jenis kelaminnya lebih banyak yang sudah tidak bersekolah lagi. Berikut ini adalah

tabel anak usia dari 10 tahun ke atas dari aspek pendidikan dan jenis kelamin.

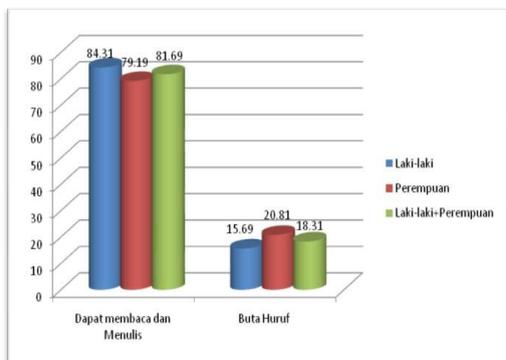
**Tabel 2**  
**Prosentase Penduduk berumur 10 tahun ke atas dari aspek pendidikan dan jenis kelamin.**

Status Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum-Tidak pernah	13,6	19,2	16,5
Masih bersekolah	20,4	19,1	19,7
Tidak bersekolah lagi	65,9	61,7	63,8
Jumlah Total	100	100	100

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009.

Sementara Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Kemampuan Membaca diketahui hanya sebagian kecil saja yang belum bisa membaca dan menulis. Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Kemampuan Membaca diketahui hanya sebagian kecil saja yang belum bisa membaca dan menulis:

**Tabel 3**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis**



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS 2009

## 2. Karakteristik Lokasi Kecamatan

Amanuban Selatan merupakan wilayah kecamatan yang jaraknya sekitar 50 KM dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Perjalanan menuju ke kecamatan ini bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat atau roda dua dengan kondisi badan jalan yang cukup baik. Struktur wilayah Kecamatan Amanuban Selatan terdiri dari pemukiman warga, areal persawahan dan perkebunan, sungai, dan lahan kosong. Kecamatan Amanuban Selatan terletak di wilayah dataran rendah yang terkoneksi antara satu desa dengan desa lainnya.

Secara demografis, Kecamatan Amanuban Selatan merupakan salah satu wilayah dengan populasi terbanyak di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Amanuban Selatan memiliki 6670 kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 12.357 Jiwa. Terdapat 10 desa yang ada di kecamatan Amanuban Selatan, antara lain:

**Tabel 4**  
**Desa-desanya di Kecamatan Amanuban Selatan**

Desa	Jumlah Jiwa
1. Desa Pollo	4.358
2. Desa Bena	3.412
3. Desa Batnun	2.830
4. Desa Oekieu	1.301
5. Desa Kiubaat	1.594
6. Desa Noemuke	2.587
7. Desa Oebelo	3.356
8. Desa Linamnutu	2.584
9. Desa Mio	1.346
10. Enoneten	1.347
Jumlah	25.012

Sumber diolah dari data rekapitulasi kecamatan

Dari aspek sosial ekonomi, masyarakat Amanuban Selatan terkonsentrasi pada pola kehidupan

masyarakat petani. Pertanian di Amanuban Selatan bersifat tadah hujan dan panen hanya sekali dalam setahun. Dengan kondisi kesulitan seperti ini, maka masyarakat mengalami kesulitan air. Selain sebagai petani, masyarakat Amanuban Selatan juga banyak yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Wilayah tujuan pekerjaan mereka bukan hanya di Kota Kupang, namun juga di Malaysia dan Singapura.

Secara historis, Kecamatan Amanuban Selatan dibentuk melalui SK Gubernur KDH Tk I Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.66/1/33 tanggal 9 Juni 1962. Kecamatan Amanuban Selatan dibentuk dengan wilayahnya meliputi bekas wilayah keketoran Noemuke dan Noebaba. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1996 tanggal 24 April 1996 tentang pembentukan 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan, Flores Timur dan Manggarai dalam Wilayah propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur maka Perwakilan Kecamatan Amanuban Amanuban Selatan ditingkatkan menjadi kecamatan penuh yaitu Kecamatan Kuanfatu.

### **B. Strategi Pengumpulan dan Keterbatasan**

Pengumpulan data di Kabupaten TTS dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) metode, antara lain: *Pertama*, wawancara terhadap pengelola BSM mulai tingkat kabupaten hingga tingkat sekoah. Instansi pengelola tingkat kabupaten yang diwawancarai antara lain, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO), Kantor Pos tingkat Kabupaten, dan Bank NTT Cabang TTS. Instansi tingkat Kecamatan yang

diwawancarai antara lain: Camat dan UPTD Dinas PPO. Sementara instansi pengelola tingkat sekolah yang diwawancarai antara lain: kepala sekolah SD dan kepala sekolah SMP. *Kedua*, *Focus Group Discussion* terhadap tokoh masyarakat, pengelola tingkat sekolah, orang tua penerima BSM, orang tua non penerima BSM, anak SD penerima BSM dan anak SMA penerima BSM. *Ketiga*, *case study* terhadap 4 keluarga yang anaknya menerima BSM di sekolah baik dari keluarga yang memiliki anak SD maupun yang memiliki anak SMA.

Strategi pengumpulan datanya mulai dari kabupaten terlebih dahulu dengan mewawancarai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO), Kantor Pos tingkat Kabupaten, dan Bank NTT Cabang TTS. Kegiatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara luas tentang bantuan terhadap siswa. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan di tingkat kecamatan sebagai lokasi wilayah penelitian. Ketiga baru dilakukan pada tingkat penerima, masyarakat dan pengelola. Meski demikian, perlu ada verifikasi bagi semua data yang diperoleh di lapangan sehingga peneliti harus balik lagi ke kabupaten.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal: *Pertama*, pada pengumpulan data di kecamatan tidak dilakukan pengumpulan data untuk kategori madrasah sebab di wilayah ini tidak ada satu pun madrasah. *Kedua*, penelitian ini tidak bisa melibatkan semua komponen sekolah (SD, SMP, SMA) sebab di wilayah ini terdapat SMP yang tidak mendapatkan BSM. *Ketiga*, terdapat pengulangan FGD karena ada peserta FGD yang tidak representatif.

### **C. Karakteristik Masyarakat dan Pemetaan Rumah Tangga/Keluarga Miskin**

Masyarakat di wilayah Amanuban Selatan memiliki karakter masyarakat yang unik, antara lain: *Pertama*, masyarakat di Amanuban Selatan sebagian bekerja sebagai buruh migran baik di kota Kupang dan Soe maupun di luar negeri (Malaysia dan Singapura). *Kedua*, terdapat dua suku yang tinggal berdampingan, yakni suku asli dan suku pendatang. Suku asli wilayah Amanuban Selatan adalah Suku Timor, sementara suku pendatangnya adalah suku Rote. Kedua suku ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun dapat melebur dalam satu momentum, yakni ketika mereka bertemu di tempat ibadah. *Ketiga*, terdapat wilayah-wilayah (*cluster*) yang miskin dari setiap desanya, khususnya desa Pollo dan desa Bena. Rumah tangga miskin dari kedua desa ini dapat di temui di wilayah-wilayah tertentu. Rumah-rumah adat suku Timor yang belum mengalami perubahan banyak dijumpai di desa Bena.

### **D. Potret Tentang Kondisi Pendidikan dan Aspirasi Masyarakat**

Kondisi pendidikan masyarakat Amanuban Selatan dipandang oleh berbagai narasumber secara berragam, baik dari aspek keinginan, prioritas pemenuhan kebutuhan, posisi perempuan dan laki-laki, pembagian tugas di antara orang tua, maupun cara memperoleh pendidikan. Keragaman pandangan dari berbagai aspek tersebut nampak ada persamaan dan perbedaan di beberapa kalangan. Berikut ini adalah

beberapa pandangan mengenai kondisi pendidikan serta aspirasi berbagai pihak:

#### **1. Aspirasi orang tua tentang pendidikan**

Adanya keinginan orang tua agar anaknya memiliki pendidikan lebih tinggi dari mereka. Kondisi ini dilatarbeakangi oleh kondisi pendidikan orang tua yang rendah yang rata-rata pendidikannya hanya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sebagiaman data hasil observasi dan wawancara mendalam serta FGD, kondisi pendidikan siswa sekolah di Amanuban Selatan memiliki perkembangan setelah adanya bantuan BSM. Setidaknya karena bantuan-bantuan yang ada memberikan prasarat bagi penerima untuk dapat rajin sekolah serta dikontrol tingkat kehadirannya oleh pihak sekolah.

Orang tua tetap mendahulukan kebutuhan anak sekolah meskipun kondisi mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kondisi kebutuhan rumah tangga dianggap bisa disesuaikan, sementara kebutuhan sekolah harus tetap terpenuhi. Beberapa orang tua siswa mengnggap bahwa kebutuhan sekolah anak merupakan prioritas utama, kebutuhan rumah tangga dapat dikesampingkan terlebih dahulu dan kebutuhan anak harus didahuukan.

Kesadaran orang tua akan pendidikan anak menjadi pemicu bagi tindakan mereka untuk

memprioritaskan kebutuhan anaknya. Kesadaran pentingnya mendahulukan kebutuhan anak dikaitkan dengan adanya harapan masa depan anaknya agar dapat berubah secara lebih baik.

Orang tua tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan karena peluang antara laki-laki dan perempuan sudah sama dalam memperoleh pekerjaan. Bagi para orang tua siswa, anak laki-laki dan anak perempuan sama saja, meskipun ada sebagian masyarakat yang menganggap ada perbedaan dalam struktur sosial mereka.

Peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan terjadi baik pada pendidikan maupun pekerjaan. Pada bidang pendidikan, saat ini baik perempuan maupun laki-laki dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk meraihnya. Bahkan ada perempuan yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga pada bidang pekerjaan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang sama. Bahkan perempuan sekarang lapangan kerjanya lebih terbuka untuk bekerja di industri, buruh, dan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Adanya pembagian tugas mengurus pendidikan anak di kalangan orang tua, urusan kebutuhan keseharian anak sekolah di tangani oleh ibu, sementara ayah hanya menerima laporan dari ibu. Meski anak merupakan tanggungjawab bersama antara orang

tua laki-laki dan perempuan, namun dalam implementasinya, para informan menganggap terdapat pembagian pekerjaan di antara mereka dimana orang tua perempuan dianggap memiliki peran yang lebih besar daripada peran laki-laki. Besarnya peran perempuan ini berhubungan dengan tempat tugas masing-masing orang tua dimana laki-laki lebih banyak bertugas di luar rumah sementara perempuan bertugas di dalam rumah sehingga urusan-urusan domestik menjadi bagian dari kewenangan orang tua perempuan. Salah satu urusan domestik yang menjadi kewajiban orang tua perempuan adalah pendidikan anak. Sementara orang tua laki-laki hanya menjadi pengontrol serta penopang ekonomi kebutuhan keluarga dan kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Orang tua tidak meminta anaknya untuk membantu dirinya bekerja, namun mereka mengasuh anak-anaknya agar tumbuh kembang secara normal, termasuk dalam memperoleh pendidikan. Orang tua menganggap bahwa bekerja bukan tugas anak melainkan tugas orang tua sehingga berhubungan dengan orientasinya. Beberapa orang tua yang ditemui peneliti di lapangan memiliki anggapan bahwa anak hanya bertugas untuk belajar sehingga dapat tumbuh menjadi anak yang pintar. Orang tua memiliki kewajiban dapat mendorong serta mendukung tugas belajar anak tersebut.

## 2. Aspirasi anak tentang pendidikan

Keinginan anak untuk menjadi orang yang sukses tidak dibatasi oleh latarbelakang ekonomi yang mereka hadapi saat ini. Kondisi ekonomi yang mereka rasakan saat ini dianggap menjadi hal biasa, namun harapan untuk tetap bersekolah tetap besar. Anak-anak menganggap bahwa kesuksesan dapat dicapai dari lapisan sosial manapun. Salah satu upaya untuk meraih kesuksesan tersebut adalah dengan memiliki orientasi masa depan dalam bentuk cita-cita.

Berdasarkan penulsuran di lapangan, para anak memiliki cita-cita yang beragam. Cita-cita tersebut juga diungkapkan oleh anak-anak disertai dengan tujuan dan harapannya. Cita-cita di kalangan anak-anak dapat tercermin dari ungkapan beberapa murid sekolah Dasar dan sekolah menengah atas berikut:

*"Beta ingin menjadi guru agar bisa ajar orang" (Justin, 20 Juli 2014).*

*"beta ingin menjadi tentara, pakaianya bagus, pegang senapan" (Deni, 20 Juli 2014).*

*"Beta mau jadi dokter, biar beta bisa periksa orang sakit" (Sanjani, 20 Juli 2014).*

*"Beta ingin menjadi perawat, biar bisa rawat orang sakit juga.(Diani, 20 Juli 2014).*

*"Sekolah wajib. Mau jadi orang harus pandai, tanpa bersekolah mau jadi apa nanti", (Agustina, 19 Juli 2014).*

## 3. Aspirasi masyarakat tentang pendidikan

Adanya pandangan bahwa pendidikan menjadi kunci bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Relevansi antara pendidikan dan perubahan menjadi persepsi yang banyak terjadi pada masyarakat.

Berdasarkan FGD yang dilakukan dengan tokoh masyarakat diperoleh sebuah temuan bahwa mereka meyakini akan pentingnya pendidikan bagi perubahan sosial. Para peserta menganggap bahwa pendidikan menjadi kata kunci bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Joseph Longa (tokoh masyarakat) dan Ibu Agustia (kepala sekolah SD):

*"Saya itu berharap pendidikan jadi kunci. Masyarakat jangan abaikan pendidikan. Boleh jadi TKI tapi yang pintar biar tidak diinjak-injak sama majikan" (Joseph Longa, Selasa 15 Juli 2014).*

*"Pendidikan itu penting. Di sini masyarakat banyak lulus SD, SMP. SMA jarang. Sekarang anak-anaknya mulai banyak SMA, kalau mereka mengedepankan pendidikan pasti bisa berubah". (Agustina, Selasa 15 Juli 2014).*

Adanya pandangan bahwa pendidikan menjadi aspek yang paling diutamakan dalam keluarga dan masyarakat. Masyarakat juga menganggap bahwa ada banyak aspek dalam kehidupan mereka,

namun yang paling utama dikedepankan adalah tetap pendidikan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ida Ulumando, guru Sekolah Menengah Atas Negeri Panite II:

*“Masyarakat kalau mengedepankan pendidikan akan lebih baik dari sekarang. Keluarga dan masyarakat harus lebih mementingkan pendidikan daripada lainnya. Di sini masih jarang orang sukses. Yang kuliah jarang, bisa dihitung sama jari. Pegawai, guru, polisi banyaknya pendatang. Orang sininya banyaknya jadi TKI. Anak disimpan sama neneknya. Kalau pendidikan mereka tinggi, tidak perlu jadi TKI bisa kerja di kota”, (Ida Ulumando, S.Pd, Selasa 15 Juli 2014).*

#### 4. Aspirasi pengelola tentang pendidikan

Adanya pandangan bahwa pendidikan harus menjadi inti/pokok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu bagian pendidikan yang dianggap perlu ditingkatkan dalam kehidupan sosial adalah akhlak dan budi pekerti. Terlebih pada kondisi yang dihadapi di wilayah penelitian bahwa siswa-siswi dari mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas juga perlu ditingkatkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Joel Lada, Kepala Sekolah SMA:

*“Pendidikan ini harus jadi inti atau pokok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akhlak, budi pekerti dan*

*kemampuan itu bagian dari pendidikan. Negara yang mengedepankan pendidikan akan maju”, (Joel Lada, 21 Juli 2014).*

Adanya pandangan bahwa masyarakat yang maju itu diindikasikan dengan adanya kemajuan di bidang pendidikan. Wakil Kepala Sekolah SMA Panite II, Bapak Yesben, menganggap bahwa tingkat kemajuan masyarakat dapat dilihat dari pendidikan yang dimiliki warganya. Informan menyadari bahwa pendidikan di wilayahnya masih dianggap tertinggal, namun peningkatan pendidikan dianggap menjadi tanggungjawab bersama. Kesadaran bahwa pendidikan menjadi indikator peningkatan kemajuan masyarakat perlu menjadi persepsi setiap orang, paparnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yesben (Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Panite II):

*“Masyarakat yang maju itu diindikasikan dengan kemajuan pendidikan. Kalau mau maju, pendidikannya penuh mulai pendidikan dasar, menengah hingga tinggi. Di sini belum, tapi harus diupayakan. Pemerintah harus terus mendorong”, (Yesben, 21 Juli 2014)*

#### E. Hambatan dan Tantangan

Implementasi pendidikan seringkali mengalami beberapa hambatan dan tantangan. Ada berbagai jenis hambatan dan tantangan yang dialami, antara lain persoalan jarak yang jauh ke tempat

sekolah, persoalan ketiadaan transportasi, persoalan uang saku, persoalan guru, persoalan teman, persoalan tugas sekolah, dan persoalan-persoalan lainnya. Beberapa hambatan dan tantangan dialami oleh beberapa pihak dalam implementasi bantuan siswa miskin, di antaranya:

1. Dari perspektif Anak

Siswa mengalami kesulitan menempuh jarak yang jauh berangkat ke sekolah sehingga harus di antar orang tua atau pun jasa angkutan lain. Berikut hasil wawancara dengan Deny (murid sekolah dasar):

*"Beta kadang diantar orang tua, kadang pakai ojek karena jarak rumah agak jauh sekitar 3 km"*  
(Deny, 20 Juli 2014).

Dalam interaksi di sekolah baik antara siswa dengan siswa lainnya atau pun anatara siswa dengan guru juga terdapat hambatan. Salah satu bentuk hambatan tersebut adalah ketika siswa melakukan permainan. Berdasarkan wawancara dengan siswa, diketahui bahwa terdapat siswa yang merasa malu tidak bisa melakukan jenis permainan tertentu pada saat bermain, sementara teman lainnya mengolok-olok atau pun menertawakan. Berikut hasil wawancara dengan Rendi (murid sekolah dasar):

*"Yang tidak suka di sekolah biasanya saat bermain, kalau tidak bisa melakukan, kadang*

*diolok-olok teman"* (Rendi, 20 Juli 2014).

Kepedulian orang tua secara berlebihan terhadap siswa juga menjadi hambatan bagi siswa. Salah satu jenis tindakan yang menunjukkan kepedulian orang tua yang berlebihan adalah berupa pemberian sanksi dengan kekerasan. Dari hasil wawancara dengan siswa, ditemukan bahwa terdapat siswa SD yang diberi sanksi oleh orang tua saat tidak mengerjakan tugas Sekolah. Berikut hasil wawancara dengan Justin (murid sekolah SD):

*"Mama cek beta ada PR atau tidak, kalau ada berarti harus kerja PR, kalau tidak mama pukul di pantat kalau malas buat tugas PR"* (Justin, 20 Juli 2014).

Pertemanan di sekolah menjadi bagian penting dalam kehidupan anak-anak di sekolah. Para siswa juga terkadang menemukan beberapa temannya yang malas. Siswa yang peduli biasanya akan mengajak temannya yang malas untuk berangkat sekolah. Namun seringkali dalam mengajak berangkat ke sekolah tidak menuai hasil. Kesulitan mengajak temannya yang tidak sekolah karena malas dan sukanya bermain untuk diajak berangkat ke sekolah menjadi hambatan tersendiri bagi teman yang baik. Berikut hasil wawancara dengan Rendy (murid sekolah SD):

*"Dekat rumah beta ada yang tidak sekolah, ada 1 atau 2 orang, tidak banyak, dia pemalas hanya mau main saja, kadang bantu orang tuanya ke kebun/sawah, katong sudah ajak tapi tetap dia tidak mau" (Rendy, 20 Juli 2014).*

Siswa SMA merasa jenuh dimarahi guru ketika mereka melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas sekolah. Bagi para siswa, tugas seringkali dianggap sebagai beban yang dapat mengganggu kesenangan mereka di sekolah. Tugas dianggap para siswa dapat berimplikasi positif, namun di sisi lain juga dapat berekses negatif. Yang dianggap dapat menjadi hambatan buat mereka adalah ketika terdapat sikap guru yang marah ketika siswa tidak dapat mengerjakan tugas. Berikut hasil wawancara dengan Dina (murid SMA Negeri Panite II):

*"Ada juga yang galak. Dikit salah dimarahi. Tapi mukul sih tidak Cuma itu bicaranya meledak-ledak. Kita jadi bete kalau dia ngomong", (Dina, 19 Juli 2014).*

Siswa SMA tidak menyukai teman sekolahnya yang meminta uang dengan paksa (*ngutip* atau *ngompas*). Tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah menjadi hambatan tersendiri bagi para siswa. Mereka terkadang menemui tindakan kekerasan tersebut yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Terdapat siswa yang dianggap nakal

yang menjadi *trouble maker* bagi siswa lainnya. Berikut hasil wawancara dengan Dani (murid SMA Negeri Panite II):

*"...yang kurang senang itu soal nakal. Ada teman yang suka maksa mintai uang, ngompas lagi. Ulahnya menyebalkan suka menghina orang lain. Saya kurang enak tapi yah bagaimana dia banyak temannya yang sama, kita hindari saja", (Dani, 19 Juli 2014)*

## 2. Dari perspektif Orangtua

Orang tua kesulitan membujuk anaknya untuk masuk sekolah ketika anak mengalami gangguan psikis. Kondisi gangguan psikis dialami setelah adanya anggota keluarga yang meninggal dunia. Ketika diminta kembali bersekolah, siswa tersebut tidak mau lagi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Elisa:

*"Gurunya, temannya membujuk tidak mau juga. Ada juga aparat desa kesini membujuk tidak mau juga. Saya sendiri membujuk terus-terusan malah marah-marah. Maunya ikut ke sawah. Tunggu burung di sawah. Mancing di sungai" (Elisa, 20 Juli 2014).*

## 3. Dari perspektif Masyarakat

Siswa mengalami kesulitan menempuh jarak yang jauh berangkat ke sekolah. Kondisi sekolah memang dianggap beberapa anggota masyarakat cukup jauh dengan pemukiman warga. Terlebih ada

beberapa anak sekolah yang rumahnya di seberang gunung. Berikut hasil wawancara dengan Deny (murid sekolah SD):

*"Beta kadang diantar orangtua, kadang pakai ojek karena jarak rumah agak jauh sekitar 3 km, (Deny, 20 Juli 2014).*

#### **F. Pengetahuan Program Bantuan**

Bantuan pendidikan yang ada di wilayah Amanuban Selatan di antaranya: *Pertama*, Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan penelusuran dari *case study*, *group discussion* dan wawancara terhadap berbagai informan dan narasumber menunjukkan bahwa mereka mengetahui beberapa bantuan berikut: *Pertama*, bantuan BOS di Amanuban Selatan direalisasikan oleh para pengelola sekolah sesuai dengan petunjuk teknisnya. Bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) direalisasikan secara rutin ke sekolah dan madrasah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hasan (Kasi Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten TTS):

*"BOS ini diterima sekolah-sekolah madrasah dibawah naungan kemenag. Jumlah sekolah yang menerima BOS sekitar sembilan madrasah, Madrasah Ibtidaiyah 5 (lima), Madrasah Tsanawiyah 3 (tiga), dan madrasah aliyah 1 (satu). Respon sekolah terhadap program bantuan ini sangat bagus. Mereka yang sekolah swasta bisa dibantu operasionalisasinya oleh*

*pemerintah"* (Hasan, 14 Juli 2014)

Siswa SD menerima bantuan pendidikan bagi anak sekolah berupa bantuan 20.000,- pertiga bulan yang diberikan dari dana BOS. Sebagaimana dinyatakan oleh orang tua siswa berikut ini:

*"Bantuan Rp. 20.000 diterima siswa sejak Bulan Januari 2014 ini, bantuan tersebut dari dana BOS. Katanya untuk beli buku dan pensil"* (Soly, 20 Juli 2014)

*"Anak-anak mendapatkan uang Rp. 20.000 ada yang memberi tahu orang tuanya ada yang tidak. Kalau yang tidak berarti digunakan untuk jajan. Tapi kalau memberitahu orang tua, berarti anaknya jujur (Yusmina, 20 Juli 2014)*

*Kedua*, bantuan Pemberian Makanan Tambahan Siswa (PMTAS) pada tahun 2012. Namun bantuan ini hanya berjalan satu tahun yang diberikan kepada siswa SD dan madrasah sebagaimana dijelaskan narasumber berikut:

*"Ada bantuan Pemberian Makanan Tambahan Siswa (PMTAS) pada tahun 2012 bagi siswa, sayangnya cuma berjalan setahun yang sumbernya dari pemerintah provinsi"*, (Hasan, 14 Juli 2014).

*Ketiga*, Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari siswa SD hingga SMA/SMK. Program BSM meningkat dari Rp. 380.000 per siswa per tahun pelajaran menjadi Rp. 450.000 per siswa per tahun untuk jenjang pendidikan. SMP dari Rp. 550.000 per siswa per tahun menjadi Rp. 750.000 per siswa per tahun. Jenjang pendidikan SMA dari Rp. 750.000 per

siswa per tahun, menjadi Rp. 1.000.000 juta per siswa per tahun pelajaran.

### G. Pengetahuan KPS/BSM

Pemahaman para narasumber terkait dengan KPS ini di antaranya: Pertama, KPS merupakan Kartu Perlindungan Sosial yang diberikan kepada rumah tangga miskin. Sejak tahun 2014, siswa penerima BSM yang diusulkan diwajibkan memiliki KPS. Para pengelola BSM memahami bahwa mereka tidak berani jika mengusulkan BSM tanpa ada KPS. Mereka yang tidak memiliki Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Bantuan Siswa Miskin tidak dimasukkan ke daftar penerima bantuan. Begitu juga ada yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Bantuan Siswa Miskin, namun tidak mengajukan karena tidak ada KTP atau KK akhirnya tidak diajukan sebagai penerima. Bahkan dalam implementasinya, terdapat BSM aspirasi yang diinformasikan oleh anggota legislatif.

Adapun pandangan mengenai KPS/BSM di kalangan masyarakat penerima, sekolah, siswa, dan pengelola cukup bervariasi. Berikut ini adalah gambaran pandangan dari mereka yang ditemui peneliti, di antaranya:

#### 1. Dari perspektif Rumah Tangga Miskin

Orang tua tidak memahami fungsi dari Kartu Perlindungan Sosial yang diterimanya. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Yun (penerima KPS):

*"Awalnya saya tidak tahu apa itu fungsi KPS, tapi saat anak saya mendapatkan Bantuan siswa*

*miskin dari sekolah dan harus menunjukkan KPS itu baru saya mengerti bahwa yang terima BSM harus memiliki KPS. (Yun, 19 Juli).*

*"Kami baru tahu BSM saat pembagian KPS dan dari sekolah panggil kami untuk rapat. (Desri, 19 juli).*

*"Saat rapat itu yang diinformasikan bahwa akan ada pencairan dana BSM bagi nama-nama yang ada dalam daftar dan orangtua harus melengkapi syarat-syaratnya (Yun, 19 Juli)*

#### 2. Dari perspektif Sekolah

Pihak sekolah aktif mendatangi kantor UPTD kecamatan dan mereka mendapatkan informasi mengenai BSM dari PPK kecamatan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Neno (Kepala Sekolah SD):

*"Kami yang aktif datang ke PPK di kecamatan, katanya ada BSM. Tidak ada undangan khusus, kami tahu dari kecamatan saja, bukan dinas kabupaten. Lalu kami teruskan ke orang tua siswa. Mereka kami undang ke sekolah. Kami kasih tahu yang punya KPS bisa diusulkan BSM, KK dan keterangan RT juga kami minta", (Neno, 15 Juli)*

Pihak sekolah mendapatkan sosialisasi dari dinas, khususnya sosialisasi kepada kepala sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Joel Lada (kepala Sekolah SMAN Panite II):

*"Selama ini orang tua siswa penerima BSM kurang mendapatkan sosialisasi, mungkin*

*tidak ada sosialisasi dari pihak lain. Informasi BSM hanya dari sekolah. Orang tua siswa kami undang ke sekolah dan diberitahu akan dapat BSM, melengkapi semua persyaratan, dan nantinya pengambilannya di bank (Joel, 21 Juli).*

Sementara pada tingkat sekolah SMPN Panite kurang mendapatkan informasi. Kepala sekolah tidak memahami bagaimana mekanisme BSM. SMPN II Panite di Desa Bena yang berjumlah 670 siswa, semuanya tidak mendapat BSM disebabkan mereka dianggap tidak memiliki NISN (nomor induk siswa nasional) sehingga tidak dapat diajukan sebagai penerima BSM.

#### **H. Sosialisasi**

Sosialisasi BSM dari beberapa sumber ditanggapi secara berragam mulai dari siapa yang melakukan sosialisasi, pihak yang menjadi objek sosialisasi, materi sosialisasi dan bentuk sosialinya sendiri. Berikut ini tanggapan beberapa pihak terkait dengan sosialisasi BSM, di antaranya:

##### **1. Dari perspektif Orang Tua**

Orang tua mendapatkan sosialisasi tentang Bantuan Siswa Miskin dari kepala sekolah melalui siswa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Elisa (Orang tua Siswa):

*“Sosialisasi itu dari sekolah, Anak saya dipanggil Bapak Kepala sekolah, kami dikumpulkan di sana. Saya tidak tahu pasti waktu, lupa. Kita diberi tahu disuruh mengumpulkan Kartu Perlindungan Sosial, Foto copy KK, KTP. Nanti akan dapat dari bank BRI. Pengambilannya*

*dilakukan oleh orang tua siswa. (Elisa, 20 Juli 2014).*

Orang tua menerima informasi adanya KPS diperoleh melalui pemberitahuan lisan oleh pihak Desa, Ketua RT setempat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Elisa dan Bapak Omsis (orang tua siswa):

*“Saya tidak melihat pengumuman atau informasi yang pasti, tapi orang tua anak lainnya juga mendapatkan informasi yang sama sehingga ia memercayai informasi tersebut” (Elisa, 20 Juli 2014).*

*“Saya tidak tahu KPS itu dikeluarkan dari mana, tiba-tiba ketua RT yang panggil saya untuk ke kantor Desa untuk ambil kartu KPS. Setelah ambil, mereka suruh kami yang terima kartu itu lapor ke sekolah lagi. Nah kalau anaknya ada yang bersekolah berarti cek di sekolah itu apakah dapat KPS dan BSM”. (Omsis, 16 Juli 2014)*

Orang tua mendapatkan kartu KPS dari aparat desa tanpa mendapatkan penjelasan secara leih rinci dari petugas. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Aplonia dan Ibu Desri (orang tua siswa):

*“Beta tidak tahu, kapan di data, sapa yang masukan nama, terkejut saja pak RT kasih tahu untuk beta ke kantor desa ambil kartu itu. Saat ambil petugas di kantor desa hanya bilang jaga baik-baik ini kartu karena nanti kasih tunjuk ini kartu baru bisa dapat bantuan, karena sekarang kalau mau pakai surat keterangan tidak mampu kadang tidak bisa dilayani atau langsung di tolak,*

*jadi harus pakai kartu KPS ini (Aplonia, 19 Juli)*

*"Saya tahu kepanjangan KPS dan BSM itu tapi untuk apa dan pakai bagaimana saya tidak tahu sampai pihak sekolah memanggil kami orang tua untuk melengkapi administrasi untuk pencairan BSM, hanya petugas yang bagi kartu bilang jaga baik-baik jangan sampai kartu KPSnya hilang. KPS menjawab sudah pakai untuk pengambilan BLSM dan BSM. (Desry, 19 Juli)*

## 2. Dari perspektif Pihak Sekolah

Pengelola BSM siswa SD mendapat informasi dari UPTD. Pihak sekolah dasar selama ini selalu mendapatkan informasi dari UPTD Kecamatan. Namun UPTD Kecamatan tidak memberikan informasi ke SMA dan SMP, unit ini hanya melakukan koordinasi saja dengan SMP dan SMA. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Deborah (pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS):

*Sosialisasi tentang BSM hanya dilakukan oleh pihak dinas PPO kepada kepala sekolah pada saat memasuki/ setelah mendapatkan informasi dari pusat, baik lewat surat maupun radiogram. Ada sekolah yang melaksanakan dan ada juga yang tidak ambil, karena selain syarat terbaru yang dirasakan cukup berat, karena jarak tempuh yang jauh, kadang masyarakat juga ingin cepat realisasi tanpa melihat mekanismenya (Deborah, 14 Juli).*

## 3. Dari perspektif Siswa

Siswa penerima bantuan dari tingkat SD memperoleh informasi dari orang tua dan sekolah. Anak sekolah sendiri menerima berbagai informasi dari orang tua mereka yang diundang ke pihak sekolah. Berikut hasil wawancara dengan Sanjani, Justin dan Deny (siswa SD):

*"Beta baru dengar ketika BSM mau cair, itupun di kasih pengumuman oleh bapak kepala sekolah (Sanjani, 20 Juli)*

*"Selama ini beta juga tidak pernah tahu karena mama yang biasa urus untuk sekolah, hanya beta dengar-bahwa beta masuk daftar penerima BSM. beta dengar dari mama dan juga guru di sekolah bahwa yang dapat BSM itu yang punya KPS, tapi beta juga tidak tahu apa itu KPS (Justin, 20 Juli)*

*"Beta juga dengar di sekolah BSM tapi beta tidak tahu apa itu BSM sampai kemarin mau cair uang itu baru beta tahu ternyata itu bantuan berupa uang. Di sekolah kami ada banyak yang dapat BSM, hanya beberapa yang tidak dapat, saya juga tidak tahu kenapa mereka tidak dapat, (Deny, 20 Juli)*

## 4. Dari perspektif Pengelola Kabupaten

Sosialisasi dilakukan instansi dinas di Kabupaten melalui surat dan radiogram kepada kepala-kepala sekolah. Dinas PPO Kabupaten melakukan sosialisasi dengan berbagai media, baik surat, SMS, maupun radio gram. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Deborah (Pegawai Dinas PPO):

*“Sosialisasi tentang BSM hanya dilakukan oleh pihak dinas PPO kepada kepala sekolah pada saat memasuki/setelah mendapatkan informasi dari pusat, baik lewat surat maupun radiogram. Ada sekolah yang melaksanakan dan ada juga yang tidak ambil, karena selain syarat terbaru yang dirasakan cukup berat, karena jarak tempuh yang jauh, kadang masyarakat juga ingin cepat realisasi tanpa melihat mekanismenya (Deborah, 14 Juli).*

## **I. Pemanfaatan BSM**

Pemanfaatan BSM ternyata bukan hanya dirasakan oleh siswa di sekolah, namun juga dirasakan oleh keluarga siswa dan pihak sekolahnya. Berikut ini adalah gambaran pemanfaatan BSM di masing-masing pihak:

### **1. Dari perspektif Siswa**

BSM digunakan siswa untuk pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi ke sekolah, uang saku di sekolah, dan pembelian alat transportasi ke sekolah, khususnya sepeda. Berikut hasil wawancara dengan Sanjani dan Rendy (siswa SD):

*“Uang bantuan untuk beli baju seragam, buku tulis. Selama ini kalau mau beli baju seragam mesti tunggu nenek dapat uang lebih baru bisa beli tapi sekarang sudah ada khusus untuk beli perlengkapan sekolah. Deny mengatakan bahwa karena seragamnya baru terus dia tambah rajin ke sekolah, karena kalau rajin pasti dapat bantuan. (Sanjani, 20 Juli 2014).*

*“Uang bantuan yang beta dapat kemarin untuk beli sepeda karena jarak sekolah agak jauh jadi*

*mendingan beli sepeda, karena itu yang dibutuhkan sekarang, selama ini kalau mau ke sekolah malas jalan kaki harus naik ojek, bayar mahal, (Rendy, 20 Juli)*

### **2. Dari perspektif Rumah Tangga Penerima**

Orang tua menggunakan BSM untuk kebutuhan rumah tangga setelah mereka memenuhi kebutuhan sekolah siswa. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Wasti (orang tua siswa SD):

*“Kita beli keperluan anak sekolah tetapi kalau sudah rasa cukup dan lengkap maka uang sisa yang ada kami pakai beli beras, sabun” (Wasti, 19 Juli).*

Orang tua mengetahui adanya pemotongan rekening dan memaklumi terhadap pemotongan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Wasti (orang tua siswa SD):

*“Pemotongan rekening oleh pihak bank secara langsung, dengan alasan untuk tabungan anak dapat dimaklumi orangtua, karena mereka merasa hanya dipotong 50.000 saja, masih ada sisa. Tapi di rekening harus sisa 50.000. bank langsung potong, (Wasti, 19 Juli).*

### **3. Dari perspektif Sekolah**

BSM dapat berguna dalam mengontrol kerajinan dan prestasi siswa di sekolah. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Neno (Kepala Sekolah SD):

*“BSM membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa*

*miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Kita juga bisa kontrol kerajinan dan prestasi siswa”, (Neno 15 Juli 2014).*

Kepala sekolah juga bisa mengancam siswa yang tidak rajin dengan memberhentikan bantuan BSM kepada siswa yang malas. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Deborah (pegawai Dinas PPO):

*“Penekanan dari kepala sekolah karena yang terima BSM harus rajin dan tidak boleh alpa” (Deborah, 14 Juli 2014)*

## **J. Usulan/Harapan**

### **1. Siswa**

Siswa mengharapkan jenis bantuan berupa perlengkapan alat sekolah dan kebutuhan sekolah lainnya.

*“Kalau bisa bantuan untuk alat olahraga, kami di sini kalau mau olahraga harus beli baju seragam sendiri, bola juga, itu mahal di sini, (Rendy, 20 Juli 2014).*

*“Selain bantuan uang, kami butuh buku pelajaran (buku paket/buku teks), karena kami di sini jauh dari toko buku dan kami tidak punya uang untuk beli buku cetak karena harga mahal sekali, jadi kami belajar apa adanya saja. Justin menambahkan kalau bisa kasih bantuan buku tulis, pensil pokoknya perlengkapan sekolah supaya kami tidak usah beli lagi di pasar (Sanjani, 20 Juli 2014).*

### **2. Rumah Tangga Miskin**

Orang tua penerima mengharapkan bantuan agar terus berlanjut agar anaknya dapat terus

bersekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Omsis dan Ibu aplonia:

*“Kalau bisa BSM itu ada “terus”(berlanjut), karena sangat membantu kalau kami belum panen atau belum ada uang maka kalau BSM sudah cair uangnya bisa bantu beli keperluan sekolah dan kadang makan minum. Kemudian saat ini beasiswa dianggap cukup karena anak masih SD tapi kalau bisa dinaikan kalau anak sudah SMP-SMA. Kemudian yang terakhir Setiap tahun banyak sekali pendataan tapi kami tidak tahu untuk apa data tersebut. (Omsis, 16 Juli).*

*“Kalau bisa bantuan-bantuan yang pemerintah kasih tetap berlanjut misalnya RASKIN, BLT. Bantuan untuk anak sekolah tetap di lanjutkan karena kami di sini miskin jadi sangat terbantu untuk biaya sekolah anak cucu, sehingga anak cucu kami tidak putus sekolah. Persyaratan bantuan jangan terlalu sulit, kalau bisa hanya pakai surat keterangan tidak mampu saja sudah cukup” (Aplonia, 19 Juli)*

### **3. Sekolah**

Pihak sekolah berharap jumlah kuota BSM diperbanyak lagi agar bisa membantu siswa miskin lainnya. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Neno (kepala sekolah SD):

*“Bantuan BSM dapat lebih diperbanyak lagi quotanya sehingga banyak siswa-siswi yang mendapatkan” (Neno, 21 Juli 2014).*

#### 4. Dinas

Dinas berharap kepala sekolah dapat mengambil dana bantuan siswa, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Deborah (Pegawai Dinas PPO Kabupaten TTS):

*“Untuk daerah terpencil uang senilai 300 ribu tidak ada nilainya karena habis untuk transportasi mengambil uang bantuan di kota, sehingga lebih baik kepala sekolah yang mengambil uang itu karena pengaruh jarak, dimana kalau orangtua yang mengambil akan memakan waktu sehari-hari di bank (menunggu), dengan alasan dari pihak bank adalah bank masih urusan lain-lain (pensiun,dll”, (Deborah, 14 Juli)*

#### F. Daftar Pustaka

- Adams L. and E. Kebete (2005) *Breaking the Poverty Cycle: a Case Study of Cash Interventions in Ethiopia, Background Paper*, Humanitarian Policy Group, London: Overseas Development Institute.
- Bailey, S., Savage, K. and S. O’Callaghan (2008) *Cash transfers in emergencies. A synthesis of World Vision’s experience and learning*. World Vision International.
- CaLP (nd) *Delivering cash through cards. A quick delivery guide for cash transfer programming in emergencies*.
- Cross, T. and A. Johnston (2011) *Cash transfer programming in urban emergencies. A toolkit for practitioners*. CaLP.
- Devereux, S. and Jere, P. (2008) *Choice, Dignity and Empowerment. Cash and Food Transfers in Swaziland. An evaluation of Save the Children’s Emergency Drought Response, 2007/08*. Save the Children.
- [http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/SavetheChildren\\_Emergency\\_Drought\\_Response\\_Evaluation\\_08\\_1.df](http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/SavetheChildren_Emergency_Drought_Response_Evaluation_08_1.df) [accessed 14 Sep 2012].
- Gentilini, U (2007) *Cash and Food Transfers: A Primer*. Rome: World Food Programme.
- Grindle, Merilee S. (2011) 'Governance Reform: The New Analytics of Next Steps', *Governance* 24(3): 415-418.
- Hanlon, J., Barrientos, A. and D. Hulme (2010) *Just give money to the poor. The Development Revolution from the Global South*. Kumarian Press.
- Harvey and Bailey, 2011
- Hickey, S. (2007) *Conceptualising the Politics of Social Protection in Africa*. BWPI Working Paper 4. Brooks World Poverty Institute. University of Manchester.
- Hurrell, A. and I. MacAuslan (2012) *The political implications of cash transfers in sub-Saharan Africa: shaking up the social system*. *Public Management Review* 14 (2) Special Issue: *The Politics and Governance of Public Services in Developing Countries*: 255-272.
- Mac Auslan, I. with L. Phelps (2012) *Oxfam GB Emergency Food Security and Livelihoods Urban Programme Evaluation. Final Report*.
- <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OGB%20E>

- FSL%20Urban%20Evaluation.  
pdf [accessed 12 Sep 2012].
- MacAuslan, I. & L. Crawford (2012)  
Mid-Term Review Of The  
Urban Livelihoods And Social  
Protection Programme In  
Kenya. Oxford Policy  
Management.
- MacAuslan, I. (2010) Evaluation of  
Concern's Post Election  
Violence Recovery (PEVR)  
Programme. Oxford Policy  
Management.